

MEMAHAMI MUTU DALAM KAITAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

(sebuah tinjauan pustaka)

Oleh : HE.TAJUDDIN NOOR

Dosen pada Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang Abstract:

Mutu adalah sebuah konsep upaya konsisten dan berkelanjutan dalam mewujudkan tercapainya kebutuhan dan kepuasan pelanggan (Sallis: 2005). Bermula konsep ini dari dunia industri yang kemudian merambah dan diterapkan dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar secara terus menerus yang bertujuan berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab (UU Sisidiknas no 20 psl 6/2003.) mutu pendidikan adalah keberhasilan totalitas layanan manajemen pendidikan dalam menghantarkan peserta didik untuk memiliki nilai nilai yang bermakna bagi kehidupannya.

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk : (1). Alternatif pilihan bagi para pendidik dalam upaya akselerasi mutu pendidikan, (2). Alternatif pilihan para pemimpin pendidikan dalam mengembangkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS),(3). Alternatif pilihan bagi para penyelenggara pendidikan termasuk UNSIKA, dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan yang menjadi dambaan Masyarakat. Kata kunci : Mutu, mutu pendidikan, manajmen berbasis sekolah (MBS).

A. PENDAHULUAN

Mutu pendidikan masih merupakan impian dan harapan besar bagi masyarakat Indonesia. Hary Suderajat mengutip data dari HDI (Human Development Index) bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada ranking 112 dari 127 negara di tahun 2003 dan berada pada ranking 111 dari 127 negara yang diukur di tahun 2004. Data tersebut pernah dilaporkan Mendiknas di tahun 2001 yang mengindikasikan pendidikan Indonesia masih rendah dalam komparasi internasional.

Study literatur ini bertujuan untuk menggambarkan : (1) konsep mutu yang ideal dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, (2) bahan renungan bagi guru dan dosen, (3) upaya pencitraan bagi civitas Unsika yang sedang berkembang kearah layanan pendidikan yang lebih berkualitas.

B. KONSEP MUTU

Istilah mutu berasal dari dunia bisnis Industri atau perusahaan. Dipopulerkan oleh tiga orang *Guru Mutu* yaitu W. Edward Deming, Yosep Juran, dan Philip Crosby sekitar tahun 1930 an. Mereka memandang bahwa masalah mutu terkait erat dengan manajemen (Edward Sallis: 97) sehingga muncullah istilah Total Quality Management (TQM) atau Manajemen Mutu terpadu (MMT). Namun demikian tidak satupun diantara tiga orang guru mutu di atas merekomendasikan isu-isu mutu diterapkan dalam dunia pendidikan. Gelombang baru penerapan mutu dalam dunia pendidikan terjadi pada awal tahun 1990 an. Bermula dari perguruan tinggi di Amerika dan kemudian diikuti oleh perguruan tinggi di Inggris. Walaupun pada mulanya penerapan mutu dalam dunia pendidikan mendapat penolakan dari kalangan fakar pendidikan di Inggris yang menghawatirkan bahasa manajemen Industri diterapkan dalam pendidikan, namun pada perkembangan selanjutnya terjadi kerjasama pendidikan dan bisnis yang membuat konsep-konsep Industri dapat diterima dalam dunia pendidikan, seperti istilah mutu

pendidikan. Dapat dimengerti kenapa ketiga orang *guru mutu* tidak merekomendasikan penerapan isu-isu mutu dalam pendidikan, karena banyak implikasi istilah yang mungkin akan mendistorsi makna pendidikan, seperti istilah pelanggan, kepuasan, kebutuhan yang biasa merujuk kepada nilai material semata. Sementara pendidikan mengandung makna pesan-pesan nilai yang jauh lebih agung dan bermakna.

Secara filosofis mutu merujuk kepada upaya yang terus menerus dan berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan pelanggan (Sallis : 2004). Namun seperti yang dikatakan *guru mutu* di atas bahwa mutu terkait erat dengan manajemen. Maka mutu pendidikan adalah keberhasilan totalitas layanan pendidikan dalam menghantarkan peserta didik untuk memiliki nilai-nilai yang bermakna bagi kehidupannya.

C. BEBERAPA PANDANGAN KONSEP MUTU PENDIDIKAN

Dalam bukunya Manajemen Peningkatan Mutu berbasis Sekolah (MPMBS), Hari Suderajat: 2005, melihat mutu pendidikan melalui empat pendekatan:

Pertama, pendekatan program Depdiknas 2001-2004 dengan program Broad Based Education (BBE). Melalui pendekatan ini, mutu pendidikan diukur dengan kemampuan peserta didik yang mengarah pada penguasaan kecakapan hidup (Life Skill) yang dapat meningkatkan harkat dan martabat peserta didik di tengah kehidupan masyarakat.

Mutu pendidikan versi pendekatan BBE ini, lebih dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat jangka pendek, belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam misi pendidikan yang ideal, sekalipun dalam program BBE ini terkandung pesan kecakapan personal dan kecakapan sosial, namun penekannya pada kecakapan kejuruan. Jadi masih perlu peningkatan kearah yang lebih mengantarkan peserta didik pada pengembangan potensi yang holistik dan komprehensif.

Kedua, pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui pendekatan ini, mutu pendidikan diukur dengan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang dapat meningkatkan daya beli dan meningkatkan derajat kesehatan. Tidak jauh berbeda dengan konsep mutu pendidikan melalui pendekatan program BBE, mutu pendidikan melalui pendekatan IPM ini juga lebih banyak menekankan pada penyiapan lulusan yang siap untuk memenuhi hajat hidup yang lebih bersifat material, baik terpenuhinya sisi ekonomi maupun sisi kesehatan fisik. Jadi masih belum mencerminkan pendidikan yang mewujudkan manusia utuh, ada sisi kemanusiaan ruhaniyah yang belum tersentuh.

Ketiga, melalui pendekatan fungsi pendidikan nasional. Pendekatan fungsi pendidikan melihat mutu pendidikan sebagai lembaga yang berfungsi “ mengembangkan watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (UU Sisdiknas No 20/2003 ps 3). Pendekatan fungsi pendidikan, melihat mutu pendidikan dengan mengposisikan peserta didik sebagai bagian kehidupan berbangsa. Disini kita melihat bahwa peserta didik sebagai aset bangsa yang harus

dihantarkan ketinggian kecerdasan yang memungkinkan bisa mengembangkan watak kepribadiannya dan dapat berkiprah membangun peradaban bangsa yang bermartabat. “ Disini selalu terdapat dialektika antara kepentingan individu untuk mengolah dan mendalami nilai-nilai yang menurut dia baik, dan kepentingan negara yang menginginkan agar warga negaranya memiliki semangat publik demi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat.” (Doni Koesoema: 2007). Pendekatan fungsi pendidikan nasional, melihat mutu pendidikan diukur dengan hasil lulusan yang berguna bagi pembangunan bangsa disamping tentu dapat meningkatkan kesejahteraan pribadinya. Disini kepentingan negara sangat kental dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Keempat, pendekatan tujuan pendidikan nasional. Mutu pendidikan dalam tinjauan tujuan pendidikan nasional, secara konseptual sudah mencerminkan tujuan ideal hasil lulusan. Dalam pasal 3 Undang-undang Sistem pendidikan nasional no. 20 tahun 2003 termuat : “ Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab.”

Secara konseptual tujuan pendidikan itu, telah mencerminkan adanya tiga domain pendidikan yaitu afektif terdiri dari beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Kognitif yaitu, berilmu, cakap, kreatif, dan psikomotor yaitu, sehat, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab. Namun sayang konsep yang begitu ideal, holistik, dan komprehensif, dalam tataran implementasi proses KBM di Sekolah, mengalami distorsi dengan menekankan sisi kognitif dalam penyelenggaraan pendidikan. Indikatornya dengan mudah dapat dilihat dan sudah menjadi pemahaman klasik di masyarakat bahwa mutu pendidikan diukur dengan simbol-simbol yang mengarah pada penekanan kognitif belaka seperti IPK, NEM, lulus UN, Ijazah, Diploma. Padahal bila dicermati pesan yang termaktub dalam tujuan pendidikan dengan jelas mendahulukan penyebutan iman dan taqwa serta akhlak mulia. Ini artinya tujuan pendidikan mengutamakan penanaman nilai-nilai luhur dan mulia yang mesti menjadi acuan prioritas utama bagi para pengambil keputusan dalam kepemimpinan pendidikan, para perancang kurikulum, para pengambil kebijakan publik dan para pendidik.

Pesan yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional, harus menjadi acuan utama bagi para pendidik untuk mendahulukan penanaman nilai iman taqwa dan akhlak mulia. Tidak terkecuali bagi guru guru mata pelajaran umum atau dosen yang mengajar mata kuliah umum. Terlebih bila kita mencermati adanya kecenderungan global dimana dunia sekarang tengah mengalami titik balik peradaban seperti yang dikatakan Dedi Supriadi dalam pengantar buku pendidikan nilai (2004) “ sekarang mereka hampir sepakat untuk menyatakan : “ There is such thing the so-called value-free science “ (tidak ada yang disebut sains bebas nilai). Ini berarti bahwa setiap guru atau dosen wajib, menurut undang-undang sisdiknas 2003 untuk mengutamakan penanaman nilai nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia terlebih dahulu, sebelum mengembangkan daya kognitif dan psikomotor peserta didik. Hal ini

semestinya harus terlebih dahulu diawali oleh para pengambil kebijakan pendidikan baik di tingkat makro maupun para pemimpin pendidikan di tingkat mikro.

Bila kemudian dilapangan ternyata lebih mengutamakan pengembangan potensi kognitif dan psikomotor peserta didik, sementara aspek yang berkaitan penanaman nilai-nilai afektif seperti keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia tidak diutamakan malah cenderung asal-asalan, maka sebenarnya kita semua, mulai para pemimpin pendidikan, tenaga kependidikan dan para pendidik telah dengan sengaja “*berkhianat*” terhadap Undang-undang yang berarti juga “*berbuat dosa*” publik. Terlebih kalau hal demikian itu dilakukan oleh para Guru/ Dosen PAI yang seharusnya menjadi para pendidik terdepan yang merespon dan mengimplementasikannya dalam proses KBM di kelas. Wajah buram bangsa ini harus segera diakhiri dengan mengawali mengutamakan fokus penanaman nilai-nilai ilahiyah oleh para pendidik, para pengambil kebijakan pendidikan dan para tenaga kependidikan. Kita berkeyakinan bahwa para pendidik, telah melaksanakan penanaman nilai-nilai luhur ilahiyah kepada para peserta didik di sekolah-sekolah, namun “*dosisnya*” mesti ditambah sesuai dengan tingkat merosotnya perilaku siswa yang cenderung mengkhawatirkan.

D. MUTU PENDIDIKAN MELALUI MBS

Para Guru mutu menegaskan : “ Mutu terkait dengan manajemen”. (Sallis:2007). Penegasan ini bila dikaitkan dengan pendidikan berarti kunci terwujudnya mutu pendidikan terletak dalam manajemen. “Sejalan dengan dimulainya otonomi daerah di Kota dan Kabupaten maka pemerintah memberikan otonomi pendidikan ke Sekolah dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. “ (Hari Suderdjat: 2005).

Manajemen berbasis sekolah (MBS) merujuk kepada UU Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 butir 1 yaitu “ *pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip **manajemen berbasis sekolah/ madrasah.***”

Dalam implementasinya manajemen berbasis sekolah berarti melaksanakan fungsi-fungsi manajemen terhadap semua komponen pendidikan di sekolah. Komponen-komponen pendidikan di sekolah terdiri dari : Kurikulum, personalia, kesiswaan, sarana dan prasarana, keuangan, dan lingkungan sekolah.

Ruang lingkup dan cakupan MBS secara matriks dapat kita lihat sbb :

Fungsi manajemen Komponen Pendidikan	Perencanaan (A)	Pengorganisasian (B)	Penggerakan (C)	Pengawasan (D)	Evaluasi (E)	Hasil
1. Kurikulum	A.1	B.1	C.1	D.1	E.1	M
2. Personalia	A.2	B.2	C.2	D.2	E.2	M
3. Kesiswaan	A.3	B.3	C.3	D.3	E.3	M
4. sarana prasarana	A.4	B.4	C.4	D.4	E.4	M
5. keuangan	A.5	B.5	C.5	D.5	E.5	M
6. lingkungan	A.6	B.6	C.6	D.6	E.6	M
7. Sekolah	M	M	M	M	M	MMT

BAGAN : sumber buku MPMBS Hari Suderdjat: 2005.

Matrik di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. A.1, B.1, C.1, D.1 dan E.1 merupakan gambaran kegiatan pengelolaan (manajemen) Kurikulum. Kurikulum yang dimenej oleh pimpinan sekolah dengan perencanaan yang baik, pengorganisasian yang rapih, penggerakan yang kompak, pengawasan yang ketat, dan evaluasi rutin dan menyeluruh akan menghasilkan Kurikulum yang ber-mutu (M).
2. A.2, B.2, C.2, D.2, dan E.2 adalah kegiatan pengelolaan (manajemen) personalia. Personalia yang dimenej oleh pimpinan sekolah dengan perencanaan yang baik, pengorganisasian yang rapih, penggerakan yang kompak, pengawasan yang ketat, dan evaluasi rutin dan menyeluruh akan menghasilkan personalia yang ber- mutu (M).
3. A.3, B.3, C.3, D.3, dan E.3 adalah kegiatan pengelolaan (manajemen) kesiswaan. Kesiswaan yang dimenej oleh pimpinan sekolah dengan perencanaan yang baik, pengorganisasian yang rapih, penggerakan yang kompak, pengawasan yang ketat, dan evaluasi rutin dan menyeluruh akan menghasilkan kesiswaan yang ber-mutu (M)
4. A.4, B.4, C.4, D.4, dan E.4 , adalah kegiatan pengelolaan (manajemen) sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang dimenej oleh pimpinan sekolah dengan perencanaan yang baik, pengorganisasian yang rapih, penggerakan yang kompak, pengawasan yang ketat, dan evaluasi yang rutin dan menyeluruh akan menghasilkan Sarana dan prasarana yang ber-mutu(M).
5. A.5, B.5, C.5, D.5, dan E.5 adalah kegiatan pengelolaan (manajemen) keuangan. Keuangan yang dimenej oleh pimpinan sekolah dengan perencanaan yang baik, pengorganisasian yang rapih, penggerakan

yang kompak, pengawasan yang ketat, dan evaluasi rutin dan menyeluruh akan menghasilkan Keuangan yang ber-mutu (M).

6. A.6, B.6, C.6, D.6, dan E.6 adalah kegiatan pengelolaan (manajemen) Lingkungan. Lingkungan yang dimenej oleh pimpinan sekolah dengan perencanaan yang baik, pengorganisasian yang rapih, penggerakan yang kompak, pengawasan yang ketat, dan evaluasi yang rutin dan menyeluruh akan menghasilkan Lingkungan yang ber-mutu (M).

7. Sekolah yang dimenej oleh pimpinan sekolah dengan pendekatan manajemen mutu yang terpadu (MMT), akan menghasilkan Sekolah yang bermutu dan lebih bisa diharapkan akan menghasilkan lulusan yang bermutu pula. Sekolah yang demikian itulah yang kemudian kita kenal dengan (MPMBS), Manajemen Peningkatan Mutu berbasis Sekolah.

E. PENANGGUNGJAWAB MUTU PENDIDIKAN

Sebelum lahir Undang-undang Sistem pendidikan Nasional no 20 tahun 2003, manajemen pendidikan sangat sentralistik. Semua kegiatan pengelolaan pendidikan serba terpusat, sementara kepala Sekolah dan guru hanya sebagai pelaksana saja dari semua kebijakan pusat. Sehingga kepala sekolah kurang berfungsi secara maksimal, karena tidak memiliki keleluasaan untuk menjadi pemimpin pendidikan dan tidak dominan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dan guru hanya berfungsi sebagai pengajar dan penyampai kurikulum apa adanya dari pusat.

Sejalan dengan digulirkannya Undang-undang Sistem pendidikan Nasional no 20 tahun 2003, dan bersamaan dengan lahirnya undang-undang no 32 dan 33 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka wewenang manajemen pendidikan menjadi bersifat desentralistik, dan perwujudannya menjadi Manajmen berbasis Sekolah (MBS). Dengan demikian maka mutu pendidikan di sekolah menjadi tanggungjawab kepala sekolah. Kepala sekolah sekarang memiliki wewenang yang luas untuk mengurus rumah tangga sekolah dengan berbasis kompetensi. Jadi kunci keberhasilan pendidikan di sekolah sangat bertumpu pada kompetensi kepemimpinan kepala sekolah.

F. PELAKSANA MUTU PENDIDIKAN

Kitab suci al qur'an mengamanatkan bahwa: " *seseorang tidak akan memperoleh sesuatu (termasuk Ilmu) kecuali apa yang diupayakannya. (QS: 53: 39)* dalam konteks mutu pendidikan, seorang siswa tidak akan dapat memperoleh ilmu, tanpa ia sendiri yang harus aktif mencarinya dengan belajar dan berlatih. Namun

demikian, gurulah sebagai pelaksana langsung yang melaksanakan mutu pendidikan di sekolah melalui fungsi guru sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran. " Fungsi guru adalah mempromosikan fasilitas

belajar siswa hingga siswa menyadari bahwa ia telah memiliki kecakapan, baik kecakapan proses, kecakapan akademik ataupun kecakapan kejuruan. Istilah mempromosikan adalah mengubah minat siswa dari tidak atau kurang mau belajar menjadi mau belajar. Istilah lainnya adalah guru harus mampu

memotivasi siswa. Dengan demikian guru disebut sebagai motivator dan fasilitator.” (Hari Suderajat : 15 : 2005).

Jadi pada akhirnya mutu pendidikan bertumpu pada profesionalisme guru dalam koordnasi kepala sekolah yang kompeten.

G.KESIMPULAN

1. Mutu adalah upaya perbaikan terus menerus dan konsisten dalam mencapai kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
2. Mutu pendidikan adalah layanan manajemen pendidikan secara totalitas secara terus menerus dan konsisten dalam menghantarkan peserta didik untuk memiliki nilai nilai yang bermakna dalam kehidupannya.
3. Kepala sekolah bertanggung jawab mewujudkan mutu pendidikan dengan melaksanakan MBS (Manajmen berbasis sekolah) yang kemudian dikembangkan menjadi MPMBS (Manajmen peningkatan mutu berbasis sekolah).
4. Guru sebagai pelaksana mutu pendidikan dengan menjalankan fungsinya sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran di kelas.

H. SARAN

1. Merujuk kepada kesimpulan di atas, untuk mempercepat terwujudnya pendidikan yang bermutu berawal para pengambil kebijakan pendidikan baik ditingkat makro maupun dilevel mikro agar konsisten dengan prinsip yang termaktub dalam tujuan pendidikan Nasional UU Sisdiknas psl 6 no 20 tahun 2003.
2. Kepala sekolah sebaiknya yang benar benar memiliki kompetensi dalam kepemimpinan sekolah yaitu kepala sekolah yang memiliki tanggungjawab penuh dan mampu mengkoordinasikan fungsi fungsi MBS.
3. Guru senantiasa meningkatkan citra dirinya dengan terus menerus memperbaharui informasi yang terus berkembang berkaitan dengan peningkatan prodesimalisme guru.

I. DAFTAR PUSTAKA

1. *Himpunan perundang undangan tentang OTDA 2004-2005*, penerbit “ Citra umbara” Bandung.
2. Hari Suderajat, (2005),” *Manajemen Peningkatan Mutu berbasis Sekolah “ (MPMBS) , CV, Cipta Cekas Grafika , Bandung.*
3. *Undang-undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-undang Republik Indonesi no 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS*, Departemen Agama, Direktorat Jendral Pendidikan Islam tahun 2006.

4. Sallis, Edward (1993): *Total Quality Management in Education*, Kogan page Ltd, London.
5. Depdiknas (2002): *pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup dengan pendekatan BBE*.
6. Creech, Bill (1996) : *Lima Pilar Manajemen Mutu Terpadu (TQM)*. Binarupa Aksara, Jakarta.
7. Sanusi, Achmad, (1990); *Beberapa Dimensi mutu pendidikan*, Fakultas pasca Sarjana, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bandung.
8. Mulyana, Rohmat (2004): *Mengartikulasikan pendidikan Nilai Alfabeta*, CV. Bandung.
9. Mulyana, R. (1996); *Upaya Guru dan Kepala Sekolah dalam membina Imtaq*, Thesis , Bandung, Program Pasca Sarjana IKIP , Bandung.